

PERAN AKTIF RAKYAT DAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Disusun Oleh :

B. Pahala J. Sitanggang

Abstrak

Penelitian ini menggali peran aktif rakyat dan negara dalam mencapai kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, kesejahteraan sosial menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat kemajuan suatu negara. Penelitian ini membahas bagaimana keterlibatan aktif rakyat dan peran negara dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan sosial di tengah dinamika kompleks sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi peran aktif rakyat melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta upaya negara dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan lokal dan nasional memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial, dengan meningkatnya akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Kata kunci : Peran; Rakyat dan Negara; Kesejahteraan; Pembangunan

Abstract

This research explores the active role of the people and the state in achieving social welfare as an integral part of national development. In facing various national development challenges, social welfare is an important indicator that reflects the level of progress of a country. This research discusses how the active involvement of the people and the role of the state can influence the achievement of social welfare amidst complex social, economic and political dynamics. This study uses descriptive analysis methods to evaluate the active role of the people through participation in social and economic activities, as well as the state's efforts in providing basic services such as education, health and employment. The research results show that people's active participation in local and national development has a positive impact on social welfare, by increasing access to education, health and employment opportunities.

Keywords: *Role; People and State; Well-being; Development*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang kompleks, di mana negara berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam meraih tujuan ini, peran aktif rakyat dan negara menjadi sangat krusial. Rakyat sebagai subjek utama pembangunan memiliki potensi, pengetahuan, dan keinginan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif rakyat, serta memberikan akses yang merata terhadap peluang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, di tengah dinamika global yang cepat berubah, pembangunan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks. Globalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan konflik sosial adalah beberapa contoh tantangan yang mempengaruhi kemampuan negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat, serta perubahan demografi, memperumit upaya untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua warganya¹.

Di era globalisasi ini, tantangan pembangunan nasional semakin kompleks. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang cepat, ketidaksetaraan ekonomi, dan revolusi industri 4.0 adalah contoh dari tantangan-tantangan ini. Negara harus bersifat responsif dan proaktif dalam mengatasi tantangan ini. Kolaborasi dengan rakyat melalui konsultasi publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu aspek penting dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah peran aktif rakyat dalam proses pembangunan². Partisipasi aktif rakyat bukan hanya tentang memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan, implementasi kebijakan, dan evaluasi hasil

¹ Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1), pp.128–45.

² Asyhabuddin. (2022). Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. ICODEV: Indonesian Community Development Journal, Vol.3, (No.1), pp.31- 39.

pembangunan. Rakyat yang terlibat secara aktif dapat menjadi agen perubahan yang membantu merumuskan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara.

Peran aktif rakyat dalam kesejahteraan sosial melibatkan berbagai aspek, mulai dari partisipasi dalam proses demokratis, kegiatan sosial dan kebudayaan, hingga partisipasi ekonomi. Partisipasi politik rakyat melalui pemilihan umum, dialog publik, dan advokasi kebijakan membentuk dasar dari sistem demokrasi yang kuat. Di samping itu, partisipasi sosial melibatkan rakyat dalam berbagai kegiatan sukarela, dari pendidikan masyarakat hingga kampanye lingkungan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan³.

Peran ekonomi rakyat juga penting, terutama dalam konteks ekonomi berbasis masyarakat. Kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM) yang dijalankan oleh rakyat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi masyarakat. Selain itu juga Negara, sebagai lembaga pengatur, memiliki peran kunci dalam menciptakan kesejahteraan sosial⁴. Kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada rakyat merupakan landasan dari negara kesejahteraan. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata, serta perlindungan sosial bagi yang membutuhkan. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian peran negara dan rakyat sebagai pengatur dan fasilitator dalam pembangunan nasional sangat penting⁵. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang adil dan inklusif, memastikan hak-hak dasar warganya terpenuhi, serta mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.

³ Elviandri., Dimyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.31, (No.2), pp.252-266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>

⁴ Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya . *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, (No.1). pp.23-33. DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2672

⁵ Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Share; Social Work Journal*, Vol.6, (No.1), pp.136-147. DOI:10.24198/share.v6i1.13159

Negara yang efektif dan responsif akan mampu menggandeng rakyatnya sebagai mitra dalam membangun negara yang kokoh dan berdaya saing.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu

1. Bagaimana bentuk pertahanan negara dan rakyat dalam kesejahteraan sosial?
2. Bagaimana hakikat peran negara dalam ekonomi kerakyatan pada pembangunan nasional?
3. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pertahanan negara dan rakyat untuk mencapai kesejahteraan sosial?

Pemecahan masalah

Negara, sebagai entitas politik dan sosial, memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat manusia. Dalam sejarah panjang manusia, konsep dan konsepsi tentang negara telah mengalami perkembangan yang kompleks. Negara bukan hanya suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, tetapi juga sebuah ideologi, suatu bentuk pemerintahan, dan sebuah sistem yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah⁶. Konsepsi tentang negara melibatkan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan politis tentang hak dan kewajiban, otoritas dan kekuasaan, serta tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat. Pemikiran tentang negara telah menjadi subjek penting dalam filsafat politik sejak zaman kuno. Konsep-konsep negara pertama kali dirumuskan oleh para pemikir seperti Plato, Aristoteles, dan Confucius, yang mengajukan pertanyaan mendasar tentang keadilan, pemerintahan yang baik, dan hak-hak individu. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-

⁶ Indrawan, RMJ & Widiyanto, B. (2018). Kebijakan Offset Dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan , 6 (2).

Jacques Rousseau menyumbangkan teori-teori yang menjadi dasar bagi bentuk-bentuk pemerintahan modern⁷.

Dalam era globalisasi, konsepsi negara menghadapi tantangan baru. Integrasi ekonomi global, perubahan iklim, dan migrasi massal adalah contoh tantangan-tantangan global yang memaksa negara-negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Sementara itu, isu-isu seperti kedaulatan negara dan hak asasi manusia juga menguji konsep tradisional tentang negara. konsep negara terkait dengan keberadaan sebuah otoritas pusat yang mengatur masyarakat dan melindungi warganya. Namun, perubahan-perubahan sosial seperti Revolusi Industri, perubahan demografi, dan gerakan sosial telah mengubah dinamika konsepsi negara. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan kompleksitas masyarakat modern telah menuntut perubahan dalam peran dan fungsi negara sebagai pengatur dan penyedia layanan.

Konsepsi tentang negara tidak bersifat homogen dan dapat sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Konsep negara dapat berkaitan dengan bentuk pemerintahan (demokrasi, monarki, oligarki), ideologi politik (kapitalisme, sosialisme, liberalisme), serta budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Negara-negara maju dengan pemerintahan yang stabil dan efisien mungkin memiliki konsepsi negara yang berbeda dengan negara-negara yang sedang mengalami konflik atau perubahan politik. Munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah respons terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang merajalela selama periode industrialisasi. Negara kesejahteraan menghadirkan ide bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial⁸. Tuntutan akan keadilan sosial dan ekonomi mendorong konsep negara untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mendistribusikan kekayaan dan peluang.

⁷ Iyan Barlian, Pipih Ludia Karsa. (2023). FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum

⁸ Meinarno, E. A dan S. F. Mashoedi. (2016), Pembuktian Kekuatan Hubungan antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan, Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat

1. Bentuk pertahanan negara dan rakyat dalam kesejahteraan sosial

Konsep pertahanan negara dan kesejahteraan sosial merupakan dua pilar utama dalam pembangunan nasional suatu negara. Pertahanan negara melibatkan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah suatu negara dari ancaman luar. Di sisi lain, kesejahteraan sosial berfokus pada upaya memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang merata terhadap layanan pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan yang bermartabat⁹.

Pentingnya memahami hubungan antara bentuk pertahanan negara dan partisipasi rakyat dalam kesejahteraan sosial terletak pada fakta bahwa pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari stabilitas politik dan keamanan internal. Di samping itu, kesejahteraan sosial yang merata menciptakan masyarakat yang sejahtera dan produktif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keberhasilan pertahanan negara melalui kekuatan ekonomi dan sosial yang kuat¹⁰.

Negara-negara di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang mencakup konflik bersenjata, terorisme, dan ancaman siber. Di tingkat lokal, masalah kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan serius dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Oleh karena itu, penting bagi negara dan rakyat untuk bekerja sama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat dan memastikan kesejahteraan sosial bagi semua warga¹¹. Partisipasi aktif rakyat dalam pertahanan negara tidak hanya mencakup pengabdian dalam militer, tetapi juga melibatkan pembangunan kesadaran dan semangat patriotisme. Rakyat yang memiliki rasa memiliki terhadap negara dan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilannya cenderung lebih mendukung langkah-langkah yang

⁹ Muchaqqi, Amar dkk. 2019. Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus Di Kawasan Muara Angke). Jurnal Ekonomi Pertahanan. Volume 5 Nomor 2 Hal. 245-274.

¹⁰ Nurbaiti, Siti Robiah., & Bambang, Azis Nur. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Proceeding Biology Education Conference, Vol.14, (No.1), pp.224-228. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18940>

¹¹ Rusfiana, Yudi. 2021. Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman. Jurnal Moderat, Volume 7, Nomor 3. Hal. 483-492.

diambil untuk melindungi negara dari ancaman eksternal. Kesejahteraan sosial yang merata menciptakan masyarakat yang stabil dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sistem negara¹². Ketika warga merasa didukung oleh negara dengan adil, termasuk melalui pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, mereka cenderung memiliki motivasi dan semangat untuk melindungi negara mereka. Sebaliknya, ketidakpuasan dan ketidaksetaraan dapat menciptakan ketegangan sosial dan mengancam stabilitas internal. Adapun Bentuk Pertahanan Negara dan Rakyat dalam Kesejahteraan Sosial

1) Pertahanan Negara

a. Militer dan Keamanan Nasional

Angkatan Bersenjata, termasuk pasukan darat, laut, udara, dan pasukan keamanan lainnya, bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara serta melindungi warganya dari ancaman eksternal.

b. Hukum dan Keamanan Dalam Negeri

Kepolisian, aparat keamanan, dan sistem hukum bekerja sama untuk memastikan keamanan dalam negeri, melawan kejahatan, serta menjaga ketertiban masyarakat dan keadilan sosial.

c. Sistem Keamanan Siber: Dalam era digital, pertahanan negara melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur dan data penting dari serangan siber, yang dapat mengancam kestabilan negara dan kesejahteraan sosial warganya.

2) Pertahanan Rakyat

a. Partisipasi Dalam Militer

Rakyat berperan dalam pertahanan negara melalui perekrutan sukarelawan, layanan militer wajib, atau melalui pasukan cadangan, yang dapat diaktifkan dalam situasi darurat.

b. Kesiapsiagaan dan Pelatihan

Pelatihan rakyat dalam bidang pertolongan pertama, penanggulangan bencana, dan keterampilan bertahan hidup meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman.

¹² Setiyawan, Wahyu. dkk. 2020. Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia. Jurnal Borneo Law Review Vol.4 No.2. Hal 155-167.

c. Peningkatan Kesadaran Keamanan

Kampanye kesadaran masyarakat tentang keamanan, termasuk pendidikan tentang ancaman terorisme, kejahatan siber, dan tindakan pencegahan, memperkuat partisipasi rakyat dalam melindungi diri dan negara.

3) Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan untuk Semua

Akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat menciptakan dasar yang kuat bagi perkembangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan rakyat untuk berkontribusi pada pertahanan dan pembangunan negara.

b. Sistem Kesehatan Universal

Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas meningkatkan harapan hidup, mengurangi angka kematian, dan meningkatkan produktivitas warga negara, sehingga memberikan kontribusi positif pada pertahanan dan stabilitas sosial.

c. Lindungan Sosial

Program-program lindungan sosial, seperti bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan program bantuan tunai, membantu mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan stabilitas ekonomi bagi masyarakat.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Pelatihan keterampilan, pembangunan usaha kecil menengah, dan peningkatan akses pasar kerja membantu menciptakan mata pencaharian yang layak, meningkatkan pendapatan rakyat, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Melalui keseimbangan antara pertahanan negara yang kuat dan pemberdayaan rakyat melalui kesejahteraan sosial, suatu negara dapat menciptakan masyarakat yang aman, stabil, dan sejahtera. Kolaborasi erat antara negara dan rakyat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini, memastikan perlindungan yang baik

terhadap warga negara dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkeadilan dan damai¹³.

2. Hakikat peran negara dalam ekonomi kerakyatan pada pembangunan nasional

Dalam dinamika globalisasi ekonomi yang cepat, peran negara dalam pembangunan ekonomi suatu negara menjadi sangat krusial. Konsep ekonomi kerakyatan menonjol sebagai suatu pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam kerangka ini, negara berfungsi sebagai pendorong utama, mengatur kebijakan, dan memastikan bahwa ekonomi tumbuh bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat. Tantangan-tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan revolusi industri 4.0 telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial¹⁴.

Di tingkat lokal, masyarakat menghadapi kesenjangan pendapatan yang membesar, tingginya pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, peran negara sebagai pengatur dan pemimpin dalam menciptakan ekonomi kerakyatan menjadi sangat penting. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, pendidikan dan keterampilan masyarakat memegang peran penting¹⁵. Masyarakat yang teredukasi dan terampil cenderung lebih mampu berinovasi, memahami pasar, dan memanfaatkan peluang ekonomi. Oleh karena itu, peran negara juga terlihat dalam investasi pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat siap menghadapi tuntutan pasar global yang terus berubah¹⁶.

Selain itu, kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial semakin meningkat di kalangan masyarakat. Terdapat tuntutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya

¹³ Suhardiyanto, A. (2020). Modul Harmoni Keberagaman dan Bela Negara. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal.

¹⁴ Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa; Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol.18,(No.2),pp.105-116. DOI:10.33007/inf.v18i2.73.

¹⁵ Sulistyani, Y. A. (2018). Strategi Implementasi Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi Bangsa. *Wira*, 8-11

¹⁶ Susdarwono, ET. (2020). Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (1).

menguntungkan segelintir orang, tetapi juga menyentuh kehidupan semua lapisan masyarakat. Negara, sebagai pengatur dan fasilitator, harus menanggapi tuntutan ini dengan memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif mereka dalam proses-proses ekonomi. Di tengah dinamika pasar global yang kompetitif, negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ekonomi yang berkembang memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Negara memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, mengatur pasar, dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan mengimplementasikan regulasi yang tepat, negara dapat memastikan bahwa praktik bisnis yang adil dan etis diikuti, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi konsumen serta produsen kecil dari eksploitasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, termasuk program-program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. Ini membantu menciptakan jaring pengaman sosial yang mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi.

Dengan demikian Hakikat peran negara dalam ekonomi kerakyatan melibatkan regulasi, pemberdayaan masyarakat, investasi dalam pendidikan dan keterampilan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan memahami dan mengimplementasikan hakikat-hakikat ini dengan baik, negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa pembangunan nasional berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan adil bagi semua warga negara.

3. Implementasi atau peran dalam pertahanan negara dan rakyat untuk mencapai kesejahteraan sosial

Pengukuran kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM terdiri dari tiga unsur pembentuk utama utama

- (1) Pengetahuan
- (2) umur panjang dan hidup sehat
- (3) standar hidup layak.

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia pada Oktober 2022 berada di angka 72,91, naik 0,86 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan pencapaian tersebut, IPM Indonesia masih berada dalam kategori “tinggi”. Perkembangan IPM mengalami jeda yang cukup besar pada tahun 2020, yaitu 71,94, yang meningkat 0,2% dari tahun lalu. Biasanya karena dampak meluasnya Covid-19 yang menghambat perkembangan HDI. Meski demikian, pengendalian penyebaran Covid-19 yang baik dan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan dan solid mendukung peningkatan IPM Indonesia. Selain itu, menurut Muchaqqi (2019), kondisi disparitas sosial ekonomi yang subjektif juga berpengaruh terhadap Sishankamrata. Hal ini dapat diartikan bahwa perekonomian merupakan salah satu perspektif Pancagarta yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan Sishankamrata sebagai sistem pertahanan Indonesia.

Berdasarkan data Databoks (2022), disebutkan bahwa perekonomian Indonesia berkembang sebesar 5,23% pada semester awal tahun 2022 dibandingkan semester pertama tahun lalu (total vs. kumulatif/c-to-c), untuk sebagian besar didukung oleh pemanfaatan rumah tangga. Berdasarkan informasi Badan Pusat Pengukuran (BPS), PDB Indonesia akan mencapai Rp4,92 triliun pada kuartal kedua tahun 2022, dimana Rp51,7 triliun di antaranya berasal dari pemanfaatan terbuka. Berdasarkan informasi tersebut, perekonomian Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang menyetujui Databoks. Namun menurut Databoks (2022), pendapatan per kapita Indonesia masih berada di peringkat ke-5 dari 10 negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian gaji masih timpang.

Jika dilihat dari data tersebut pada era ini yang penuh dengan dinamika global, tantangan keamanan yang kompleks, dan perubahan sosial ekonomi yang pesat, pertahanan negara dan partisipasi aktif rakyat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang aman dan sejahtera. Pertahanan negara bukan lagi hanya tentang keamanan militer, tetapi juga tentang melindungi kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Dalam konteks ini, kolaborasi erat antara negara sebagai lembaga dan masyarakat sebagai elemen vital menjadi sangat relevan. Kesejahteraan sosial dan keamanan saling terkait secara kompleks. Kesejahteraan

sosial mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial bagi mereka yang rentan. Namun, untuk mencapai kesejahteraan sosial ini, masyarakat harus hidup dalam lingkungan yang aman dan stabil¹⁷.

Keamanan nasional melibatkan upaya pertahanan dari ancaman luar dan dalam, termasuk terorisme, bencana alam, dan konflik internal. Namun, keamanan nasional juga harus mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari ketidakamanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini menekankan bahwa pertahanan negara juga harus mencakup pertahanan terhadap kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerentanannya masyarakat terhadap bencana alam¹⁸.

4. Tantangan dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kerja sama masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan program yang dijalankan pemerintah. Meski begitu, nyatanya masih banyak hambatan dan hambatan yang menghambat dukungan masyarakat. Salah satu penghambatnya adalah perlunya kesadaran dan inspirasi masyarakat untuk mendesak terlibat dalam program sosial (Ta'dung, & Lusdani, 2020).

Hal ini disebabkan oleh berbagai variabel seperti perlunya data yang diberikan, keraguan terhadap program yang dijalankan, atau perlunya pemahaman akan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Komponen alam sosial, politik dan finansial juga dapat menjadi hambatan bagi kerja sama masyarakat. Adanya kesenjangan finansial dan sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi kapasitas dan keterbukaan masyarakat untuk ikut serta dalam program kesejahteraan sosial. Selain itu, ketidakstabilan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan akan kesempatan berekspresi juga dapat mempengaruhi dukungan masyarakat (Nurbaiti, & Bambang, 2017).

¹⁷ Widodo, R. W. (2021, September 24). Strategi Bela Negara untuk Menyiapkan Generasi Berkualitas di Era Society 5.0. <https://www.krjogja.com/angkringan/strategi-bela-negara-untuk-menyiapkan-generasi-berkualitas-di-era-society-5-0/3>

¹⁸ Winka Wino Yunanda, F. N. (2022). Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pertahanan Dan Bela Negara. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6 No 1, 1195-1202

Misalnya, di beberapa negara, individu yang mengkritik pengaturan pemerintah dapat dibatasi atau bahkan ditangkap, sehingga menghambat kerja sama mereka dalam program sosial. Dukungan masyarakat dianggap sebagai tokoh kunci dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam memberdayakan kerja sama masyarakat dalam upaya pembangunan, termasuk dalam mewujudkan program kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas dukungan masyarakat dalam program-program ini. Salah satu upaya pemerintah adalah memberikan ruang dan keterbukaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pemanfaatan program kesejahteraan sosial. Misalnya melalui kegiatan musyawarah desa atau kelurahan, masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dan kepercayaannya terhadap program kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan. Selain itu, pemerintah juga memberikan persiapan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai program kesejahteraan sosial dan keberhasilan dukungannya. Dengan cara ini, individu dapat lebih memahami pentingnya minat mereka terhadap program kesejahteraan sosial dan meningkatkan kapasitas mereka untuk ikut serta. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan motivasi atau inspirasi bagi individu untuk mengikuti program kesejahteraan sosial. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan atau hibah berupa uang kepada individu yang secara efektif mengambil bagian dalam program kesejahteraan sosial. Dengan memberikan motivasi atau inspirasi maka individu akan lebih terpacu untuk secara efektif mengikuti program kesejahteraan sosial¹⁹.

Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepentingan masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perlunya akses data yang terbuka terhadap program kesejahteraan sosial yang dapat diakses. Banyak orang yang belum mengetahui tentang program kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana mereka dapat tertarik pada program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih serius melakukan kampanye dan memberikan informasi secara terbuka mengenai program kesejahteraan sosial yang mudah diakses dan

¹⁹ Yay, Gülsün Gürkan., & Aksoy,Tolga. (2018). Globalization and the Welfare State. Quality and Quantity, Vol.52,pp.1015-1040. DOI:10.1007/s11135-017-0501-z.

cara kerja sama yang efektif. Tantangan lainnya adalah perlunya kesadaran dan partisipasi dari beberapa komunitas, khususnya di wilayah yang sulit diakses atau kurang berkembang. Beberapa individu mungkin memerlukan kepastian atau merasa tidak memiliki kapasitas untuk menaruh minat pada program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan dan arahan yang memadai kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang terbiasa mengikuti program kesejahteraan sosial. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci mewujudkan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Pemerintah sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam mengontrol pendekatan dan program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan program-program tersebut. Melalui kerjasama ini, masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan memiliki rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan, sehingga menjadikan energi koperasi yang kokoh dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat secara khusus. Salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah dalam bidang pengajaran²⁰.

Kesimpulan

Dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengatasi tantangan pembangunan nasional, peran aktif rakyat dan negara memiliki peran krusial yang tidak dapat diabaikan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yakni Kesejahteraan sosial yang berkelanjutan memerlukan kerjasama yang erat antara negara dan masyarakat. Negara harus mendengarkan aspirasi rakyat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Memberdayakan rakyat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak adalah langkah kunci dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rakyat yang terampil dan berpendidikan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Negara harus mengadopsi kebijakan ekonomi inklusif

²⁰ Yosep Watan Nitit. (2023). PRINSIP DAN DINAMIKA SISTEM PERTAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN RAKYAT. JURNAL MAHATVAVIRYA

yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program-program sosial yang ditargetkan kepada kelompok rentan dan penduduk miskin harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka juga merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Dengan demikian, peran aktif rakyat dan negara adalah fondasi utama bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Hanya dengan kerjasama yang erat dan partisipasi yang mendalam dari seluruh elemen masyarakat, negara dapat mencapai kesejahteraan sosial yang merata dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.

Saran

kemudian terdapat saran dari penulisan mengenai peran aktif rakyat dan negara dalam kesejahteraan sosial terhadap tantangan pembangunan nasional melibatkan sejumlah strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas intervensi negara yaitu Edukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan, hak-hak sosial, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. serta Mendorong partisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum, memberdayakan perempuan, dan memastikan representasi yang adil dari semua segmen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1), pp.128-45.
- Asyhabuddin. (2022). Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. ICODEV: Indonesian Community Developmnet Journal, Vol.3, (No.1), pp.31- 39.
- Elviandri., Dimyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, Vol.31, (No.2), pp.252-266.
<https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Share; Social Work Journal, Vol.6, (No.1), pp.136-147. DOI:10.24198/share.v6i1.13159
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya . Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, Vol.1, (No.1). pp.23-33. DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2672
- Indrawan, RMJ & Widiyanto, B. (2018). Kebijakan Offset Dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan , 6 (2).
- Iyan Barlian, Pipih Ludia Karsa. (2023). FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA KONSTITUSIONALITAS DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA PASCA REFORMASI. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum
- Meinarno, E. A dan S. F. Mashoedi. (2016), Pembuktian Kekuatan Hubungan antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan, Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat
- Muchaqqi, Amar dkk. 2019. Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus Di Kawasan Muara Angke). Jurnal Ekonomi Pertahanan. Volume 5 Nomor 2 Hal. 245-274.

Nurbaiti, Siti Robiah., & Bambang, Azis Nur. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Proceeding Biology Education Conference, Vol.14, (No.1), pp.224-228.

<https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18940>

Rusfiana, Yudi. 2021. Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman. Jurnal Moderat, Volume 7, Nomor 3. Hal. 483-492.

Setiyawan, Wahyu. dkk. 2020. Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia. Jurnal Borneo Law Review Vol.4 No.2. Hal 155-167.

Suhardiyanto, A. (2020). Modul Harmoni Keberagaman dan Bela Negara. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal.

Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa; Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.18, (No.2), pp.105-116. DOI:10.33007/inf.v18i2.73.

Sulistyani, Y. A. (2018). Strategi Implementasi Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi Bangsa. Wira, 8-11

Susdarwono, ET. (2020). Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Jurnal Ius Constituendum, 5 (1).

Widodo, R. W. (2021, September 24). Strategi Bela Negara untuk Menyiapkan Generasi Berkualitas di Era Society 5.0. <https://www.krjogja.com/angkringan/strategi-bela-negara-untuk-menyiapkan-generasi-berkualitas-di-era-society-5-0/3>

Winka Wino Yunanda, F. N. (2022). Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Society 5.0 Dalam

Perspektif Ilmu Pertahanan Dan Bela Negara. Jurnal Kewarganegaraan Vol 6
No 1, 1195-1202

Yay, Gülsün Gürkan., & Aksoy,Tolga. (2018). Globalization and the Welfare State.
Quality and Quantity, Vol.52,pp.1015-1040. DOI:10.1007/s11135-017-0501-
z.

Yosep Watan Nitit. (2023). PRINSIP DAN DINAMIKA SISTEM PERTAHANAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN RAKYAT.
JURNAL MAHATVAVIRYA